

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era 5.0 ini teknologi telah membawa signifikansi dalam perubahan di segala aspek dan segala sektor seperti industri, ekonomi tak luput juga dalam aspek Pendidikan. Pendidikan merupakan unsur yang penting dalam berkehidupan di masyarakat. Pendidikan juga salah satu usaha sadar dan terencana demi mewujudkan proses belajar yang aktif demi mengembangkan potensi diri dan memiliki sisi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan, salah satu faktor pendukungnya ialah pembiayaan yang mendukung jalannya aktivitas pendidikan. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program Sekolah, perkiraan anggaran, pembelanjaan anggaran, pengawasan dan pelaporan pembiayaan (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017).

Untuk menyelenggarakan pendidikan, satuan pendidikan memperoleh beberapa sumber pendanaan. Salah satunya ialah terdapat dalam PP nomor 48 Tahun 2008 Pasal 51 ayat (6) tentang Pendanaan Pendidikan adalah dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari salah satunya adalah pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang baik segi sarana dan prasarana pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap biaya pendidikan operasional sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu tujuan pendidikan. Manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai tindakan

pengurusan/ketatausahaan pembiayaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Wahyudin, 2021). Dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program Sekolah, perkiraan anggaran, pembelanjaan anggaran, pengawasan dan pelaporan pembiayaan (Heryati, 2014). Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut dengan manajemen pembiayaan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan Sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Manajemen pembiayaan Sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan Sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan Sekolah (Luneto, 2015).

Dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan dan proses kelancaran dari administrasi Sekolah Islam Terpadu khususnya sistem pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan agar pelayanan terhadap siswa dan wali siswa itu dapat dilayani dengan profesional dan baik. Proses administrasi juga salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempermudah dan meingkatkan pelayanan dan akreditasi sekolah. Kualitas dan kapasitas sebuah sekolah untuk mengelola pendataan perihal data-data peserta didik, kurikulum dan berkas penting lainnya juga merupakan salah satu indikator yang tidak bisa terlupakan.

Perubahan besar dari era ini merambah ke berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan pada tuntutan agar beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karenanya, kebutuhan salah satu layanan pendidikan untuk mengakses teknologi dan informasi menjadi lebih luas di era digitalisasi. Seorang tenaga kependidikan saat ini dituntut untuk bekerja dengan efektif, produktif juga efisien. Di zaman modern dan postmodern ini perkembangan manajemen telah pesat terutama sejak adanya kemajuan dalam teknologi. Manajemen modern memiliki kemampuan lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, didalamnya pun teknologi dijadikan kunci sukses dalam pengelolaan di samping sumber daya manusia (Irawan, 2019).

Revolusi Industri 5.0 memperkenalkan sistem komunikasi yang lebih kompleks yang di kenal dengan *teleconference*. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengakses *teleconference* yaitu *Smartphone*. Dengan digitalisasi akan menyederhanakan proses bisnis serta memangkas waktu dan biaya. Revolusi industri fase keempat ditandai dengan perkembangan dan percepatan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Kini peserta didik atau orang tua/walinya ditawarkan beberapa metode pembayaran elektronik yang semakin bervariasi diantaranya melalui *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *E-wallet*, hingga pembayaran melalui *E-Commerce*. Kemajuan teknologi menimbulkan terjadinya perubahan pada sistem pembayaran yang menyesuaikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Semakin berkembangnya teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran beralih pada sistem pembayaran non tunai yang lebih efisien serta meningkatkan nilai transaksi oleh masyarakat (Rukmana, 2016).

Sesuai dengan pasal 53 ayat (3) UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1) PP no.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan adaptasi teknologi di lingkungan Sekolah Islam Terpadu dalam pengelolaan dana pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tata kelola pembiayaan pendidikan.

Fenomena yang terjadi di Sekolah Islam Terpadu adalah metode pembayaran tunai di nilai banyak resiko yang harus ditanggung seperti kekhawatiran uang tunai di brankas, keterlambatan pembayaran SPP, inefisiensi sumber daya dan pencatatan yang masih manual yang berakibat pada pelaksanaan manajemen pembiayaan yang memakan banyak waktu sedangkan yang diperlukan pada manajemen pembiayaan adalah alokasi yang tepat cepat dan terarah. Oleh karenanya dalam pengelolaan

dana pendidikan Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung merasa perlu memenuhi tuntutan digitalisasi pada Era Industri 5.0 tersebut, dengan menambah opsi pembayaran pendidikan berbasis non-tunai untuk memudahkan proses administrasi maupun pengelolaan keuangan di Satuan Pendidikan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Digitalisasi Metode Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Berbasis Non-Tunai Terhadap Efisiensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana digitalisasi metode pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berbasis non-tunai di Sekolah Islam Terpadu se- Kota Bandung?
2. Bagaimana efisiensi manajemen pembiayaan Pendidikan di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh digitalisasi metode pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berbasis non-tunai terhadap efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan digitalisasi metode pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berbasis non-tunai di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung?
2. Untuk mendeskripsikan efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Se-Kota Bandung?

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh digitalisasi metode pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) berbasis non-tunai terhadap efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Se-Kota Bandung?

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat penelitian secara teoretis ini bisa menjadi landasan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh digitalisasi metode pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pendidikan berbasis non-tunai terhadap efisiensi manajemen pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendapat khazanah bagi pemimpin pendidikan, menambah khazanah kepustakaan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, serta menjadi masukan bagi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam untuk penelitian terkait atau sebagai contoh untuk penelitian.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman juga wawasan untuk meningkat
- b. Bagi kepala Madrasah, dapat mencapai tujuan secara optimal dengan pemakaian sumber daya seminimal mungkin dengan ketepatan mendayagunakan anggaran.
- c. Bagi para staff administrasi, dapat banyak belajar mengenai perubahan yang akan terus terjadi khususnya fitur terbaru dalam meningkatkan kualitas layanan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Sejak adanya kemajuan teknologi di zaman modern dan postmodern ini perkembangan manajemen maju dengan pesat. Manajemen modern memiliki kemampuan lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, di dalamnya pun teknologi dijadikan kunci sukses dalam pengelolaan di samping sumber daya manusia. (Irawan, 2019). Pengaruh masif dari Era Revolusi Industri 5.0 merambah ke berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Dunia pendidikan dihadapkan pada tuntutan agar beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karenanya, kebutuhan layanan pendidikan untuk mendapatkan akses teknologi dan informasi menjadi lebih luas di era digital. (Nasution, Arrahmi, Wahyuni, & Nugraha, 2022)

Teknologi digital atau *Digital Technology* adalah teknologi yang pengoperasiannya tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia dan bertujuan untuk menggunakan sistem otomatis dengan sistem komputer. Digitalisasi atau digitalisasi adalah suatu jenis perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital. (Sastya, 2023). Digitalisasi dapat diartikan sebagai proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital. Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Transformasi digital ini juga sebagai penggunaan teknologi dengan tujuan untuk secara umum meningkatkan kinerja atau jangkauan dari sebuah perusahaan (Westerman, Calm ejane, Bonnet, Ferraris, & McAfee, 2011).

Proses yang terjadi kemudian banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, hingga saat ini industri sudah semakin modern dan mengandalkan teknologi tersebut untuk terus menopang operasionalnya. Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, menghasilkan tujuan pelayanan yang prima dalam memberikan pelayanan sehingga dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan yang membuat sekolah mendapatkan keuntungan yang maksimal (Mulyani, 2021).

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan (Khayyirah, Kurniawan, & Gemilang, 2022). Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran non tunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*) (Subari, 2003). Pembayaran digital merupakan cara pembayaran yang dilakukan melalui mode digital (Puspita, 2019). *Digital payment* (pembayaran digital) merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik untuk pembayarannya. Uang digital merupakan pembayaran elektronik dan virtual yang memanfaatkan server, aplikasi jaringan dan akun virtual (Musthofa, 2020). Pada transaksi pembayaran SPP Sekolah Islam Terpadu menggunakan *mode digital* untuk mengirim dan menerima uang. Semua transaksi pembayaran *digital* dilakukan dengan *online*.

Hadirnya revolusi industri 5.0 menuntut perubahan cara hidup serta perilaku masyarakat yang mana hal ini terlihat dari adanya perubahan aktivitas masyarakat yang dilakukan dari manual menuju kearah otomatisasi melalui kombinasi teknologi digital. Inovasi teknologi informasi berbasis digital yang muncul dalam bidang jasa keuangan adalah *financial technology* (Fintech). *Financial technology* (fintech) merupakan terobosan inovasi bisnis baru melalui perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi informasi berbasis digital yang merubah model bisnis jasa keuangan dari manual menjadi otomatis melalui teknologi digital. (Rizkiyah, 2021).

Manfaat yang didapatkan dengan menggunakan fasilitas *digital payment*, antara lain :

1. Pembayaran lebih instan dan cepat

Transaksi pembayaran dapat dilakukan lebih cepat, pembeli cukup menggunakan smartphone untuk menscane QR Code yang sudah disediakan.

## 2. Tingkat keamanan lebih tinggi

Tingkat keamanan saat melakukan pembayaran dengan *digital payment* cukup tinggi. Karena penyedia layanan pembayaran digital tentunya telah membangun sistem yang sangat aman.

## 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan

Dengan menggunakan *digital payment*, pelanggan dapat berbelanja secara online kapan saja, dapat dilakukan secara kredit atau membayarnya nanti. Selain itu, dengan menawarkan metode pembayaran yang berbeda tentunya akan memudahkan transaksi bagi konsumen.

### d. Menghemat biaya pemrosesan

Transaksi *digital payment* membuat pelanggan tidak lagi mengeluarkan biaya pemrosesan yang besar, seperti layanan pembayaran menggunakan ED (*Electronic Data Capture*)

### e. Transparan

Transparansi dalam bertransaksi sangat penting untuk proses bisnis, dimana saat menggunakan *digital payment* perlu menjaga transparansi transaksi.

### f. Minim kontak

Dengan pembayaran menggunakan *digital payment* pembeli dengan penjual tidak perlu melakukan kontak langsung. (Ahmad, 2023 p.61-62)

Dari turunannya, indikator dari *Digital Payment* adalah sebagai berikut:

1. *Efficiency* : Mengacu kepada kepraktisan user menggunakan metode pembayaran.
2. *Service quality* : Kualitas pelayanan dalam model tersebut merujuk ke seluruh kualitas dukungan saat menggunakan sistem pembayaran elektronik.
3. *Perceived ease of payment* : Mengacu kepada kemudahan dalam memahami dan menjalankan sistem pembayaran
4. *Perceived speed* : Kecepatan dalam model ini merujuk ke pertukaran

informasi pembayaran harus mampu mengarah ke penggunaan sebenarnya dan pada akhirnya mengarah ke kepuasan pengguna dengan sistem.

5. *Perceived enjoyment* : Kenikmatan menggunakan sistem pembayaran elektronik diduga secara signifikan mempengaruhi kepuasan pengguna.
6. *Security* : Dimensi keamanan dalam model ini terkait penyediaan akses yang aman untuk seluruh aplikasi dan fasilitas yang tersedia.
7. *Actual use* : Penggunaan (usage) merujuk ke jumlah waktu yang dihabiskan pengguna menggunakan teknologi.
8. *Perceived benefit* : Ini merupakan penilaian keuntungan sistem pembayaran elektronik ke pelanggan, dan segala penggunaan sumber (source) termasuk waktu yang diperlukan dalam penerimaan pembayaran menggunakan sistem pembayaran elektronik. (Khoayatu Rizkiyah, 2021).

Keputusan menggunakan alat pembayaran non tunai tentu memiliki alasan tersendiri bagi semua orang termasuk para orangtua peserta didik yang salah satunya adalah faktor kelebihan yang didapatkan oleh pengguna atau pemakai alat pembayaran non tunai adalah mempersingkat waktu pembayaran SPP yang berdampak pada berkurangnya keterlambatan pembayaran SPP dari orangtua peserta didik. Praktis menjadi alasan yang paling banyak dipilih oleh pihak sekolah sebagai faktor kecepatan dan kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan alat pembayaran non tunai. Praktis dapat diartikan juga sebagai mudah dan senang memakainya atau dapat mempermudah sesuatu transaksi yang ingin dilakukan. (Khayyirah, Kurniawan, & Gemilang, 2022). Kemanan adalah keadaan merasa bebas dari bahaya sehingga mahasiswa merasa menggunakan alat pembayaran non tunai lebih aman dibandingkan dengan tunai terlebih jumlah nominal transaksinya terbilang besar. Efisien dapat diartikan tepat dan dapat menjalankan waktu dengan baik kemudian ada faktor transaksi dicatat transparan dan hemat waktu yang artinya pengguna uang elektronik dapat meminimalisir waktunya menjadi lebih baik sebagai contoh tanpa harus ke bank terlebih dahulu jika ingin melakukan transfer dan lain sebagainya (Khayyirah, Kurniawan, & Gemilang, 2022).

Manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan

pembiayaan pendidikan (Kurniady, 2016). Pengertian biaya pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan. Biaya pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah/madrasah. Pendidikan membutuhkan sejumlah sumber daya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya, sebagai sarana pendukung dan pencapaian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sumber daya finansial atau lazim disebut dengan biaya pendidikan. Biaya dalam bentuk anggaran merupakan unsur penunjang dan pendukung utama bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan dan merupakan kebutuhan nyata yang tidak dapat dielakkan. (Ansar, 2017 p.89)

Di antara cakupan dari biaya yaitu gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot/mobeler, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan pembinaan pendidikan serta ketatausahaan Sekolah/madrasah (Putri, 2019). Komponen pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar uang yang di peroleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017)

Fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen:

1. Perencanaan Keuangan dengan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu;
2. Penganggaran Keuangan berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan
3. Pengelolaan Keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara
4. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada

untuk operasional kegiatan perusahaan

5. Penyimpanan Keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
6. Pengendalian Keuangan berupa evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan;
7. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
8. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi; (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017)

Aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan di atas menjadi indikator bagi keberhasilan satuan pendidikan dalam mengelola keuangan dan pembiayaan pendidikan. (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017). Depdiknas (2000) menggunakan istilah pengelolaan keuangan pendidikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan. Jauh sebelumnya sudah dimaknai pengelolaan keuangan pendidikan ialah usaha memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam urusan layanan pendidikan.

Efisiensi bisa dikatakan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efisiensi adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efisiensi diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mulyasa, p. 82). Nilai efisiensi dikaji dari sudut kemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien ketika pencapaian sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan kuadran (*out put*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya dan perbandingan tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Artinya adalah

bahwa kegiatan pembiayaan pendidikan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya sekecil-kecilnya tapi dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017).

Efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Begitu juga efisiensi dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tentu berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan yang dibiayai sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan. Sehingga suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. (Ansar, 2017 p.93).

Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu:

a. Efisiensi internal

Suatu system pendidikan ini nilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya yang minimum.

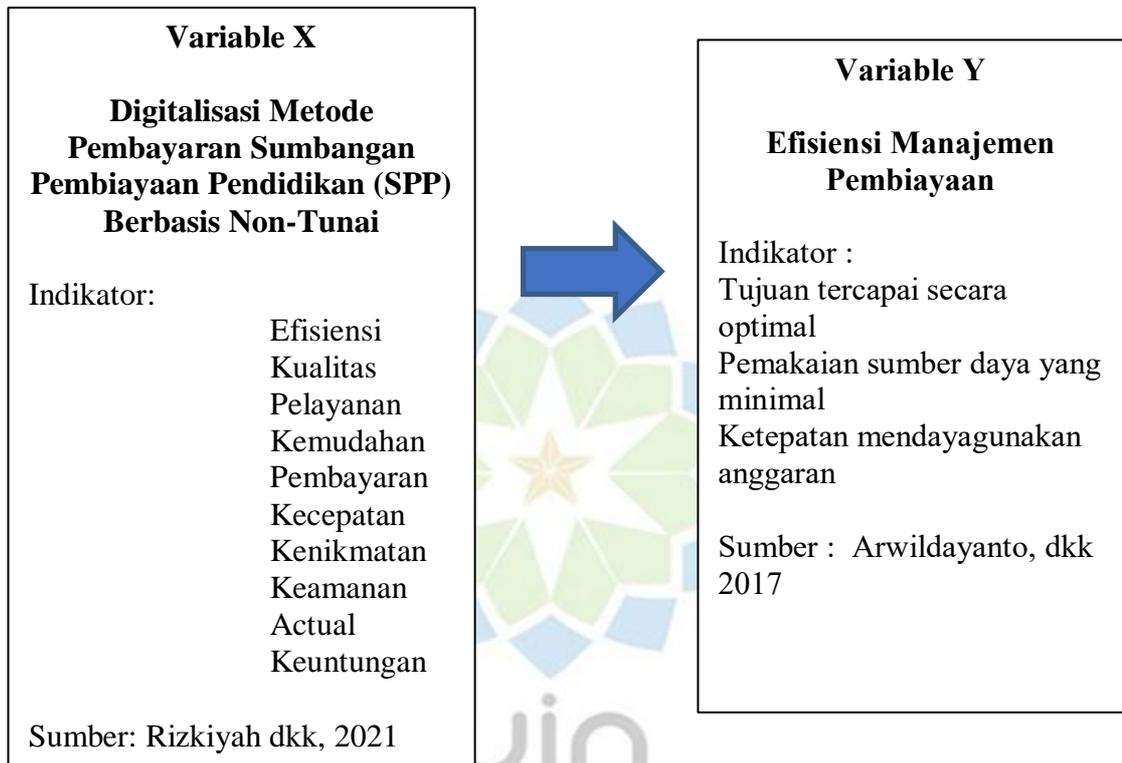
b. Efisiensi eksternal

Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. (Ansar, 2017 p.89)

Dalam biaya pendidikan, indikator efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor- faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa, perluasan layanan pendidikan bagi semua orang (*education for all*). Efisiensi manajemen keuangan dan pembiayaan dengan demikian merupakan perbandingan antara input dengan out put, tenaga dengan hasil, perbelanjaan dan masukan, serta biaya dengan kesenangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksud bisa meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya yang dikeluarkan (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017).

**Skema Pengaruh Digitalisasi Metode Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Berbasis Non-Tunai Terhadap Efisiensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**



**E. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sebentar atau sementara terhadap rumusan-rumusan masalah yang dibuat, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diperoleh disertakann dengan yang relevan, tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti empiris (Sugiyono, Mentodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2017).

Adapun Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan pada digitalisasi metode pembayaran pendidikan terhadap efisiensi manajemen pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada digitalisasi metode pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pendidikan terhadap efisiensi manajemen pembiayaan di Sekolah Islam Terpadu se-Kota Bandung.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safriadi pada tahun 2018 dengan judul “Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Komponen pembiayaan pada suatu Sekolah sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses belajar mengajar di Sekolah. Dengan kata lain setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan Sekolah memerlukan biaya yang cukup dan memadai. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola dengan manajemen yang baik agar biaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Sekolah (Safriadi, Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah, 2018).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Merza dan Herlawati pada tahun 2017 dengan judul “Sistem Informasi Pembayaran Biaya Pendidikan Siswa Pada SMK Perwira Bangsa Bekasi Utara”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa a) Dengan adanya perancangan sistem pembayaran iuran siswa yang berupa aplikasi ini, Sekolah dapat mengetahui penerima dari setiap transaksi yang sudah terjadi. b) Dengan diterapkannya sistem baru dapat mengatasi masalah dalam pembuatan laporan yang lebih akurat. c)

Dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi dapat mempercepat pencarian data transaksi (Prakoso & Herlawati, 2017).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ari dan Arif pada tahun 2019 dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Aliyah Darussalam Sumedang”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala Sekolah Islam Terpadu dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta didik. (Prayoga & Risnandi, 2019).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nursanita, Addin, Budi, Virna pada tahun 2022 dengan judul “Fenomena Digitalisasi Pembayaran Iuran Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Sekolah”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Fenomena digitalisasi ini telah banyak diterapkan pada sistem pembayaran, termasuk pembayaran uang Sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan penilaian pengguna sistem pembayaran digital di lembaga pendidikan, baik dari sisi pengelola Sekolah maupun orang tua siswa serta menganalisis implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan Sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penggunaan sistem pembayaran digital di lembaga Sekolah dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, karena penerapan sistem tersebut terbukti membuat data yang dihasilkan terutama pada siklus pendapatan menjadi lebih rapi dan akurat (Nasution, Arrahmi, Wahyuni, & Nugraha, 2022).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Susanti pada tahun 2021 dengan judul “Manajemen Pembiayaan Sekolah Penggerak: Studi Deskriptif Kualitatif di SD Negeri 08 Kabawetan”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa didalam mengalokasikan dana kepala Sekolah memegang peranan yang sangat penting, yang terlibat langsung dalam membuat alokasi dana pendidikan di Sekolah SD Negeri 08 Kabawetan adalah Tim pengembang

Sekolah, bendahara Sekolah yang khusus membukukan penerimaan dan pengeluaran uang. Hal ini sesuai dengan fungsi kepala Sekolah sebagai manajer yang mempunyai tanggung jawab mengatur keuangan Sekolah. Manajemen pembiayaan/Penyusunan program di SD Negeri 08 Kabawetan telah diawali dengan perencanaan, yang dibuat dan dilakukan oleh kepala Sekolah dan dewan pengembang Sekolah serta bendahara, dimana perencanaan pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan panduan penyelenggara (Winarso, Asrianto, Rodiah, & Edo Arribe, 2021) dan SD penggerak yang dikeluarkan oleh Dirjen Manajemen Pendidikan Sekolah dasar Direktorat Pembinaan SD (Susanti, 2021).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Doni, Rudy, Siti, Edo dan Aryanto pada tahun 2021 dengan judul “Digitalisasi dan *Cashless Payment* Untuk Meningkatkan Layanan Keuangan Pada SMK Muhammadiyah Bangkinang”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Tatakelola keuangan mutlak diperlukan dalam rangka menghasilkan pengelolaan keuangan yang akurat transparan dan akuntabel. Selain itu perkembangan teknologi pembayaran dapat mendukung dalam pengelolaan keuangan Sekolah berupa digitalisasi keuangan berbasis cashless payment dalam meningkatkan pelayanan kepada seluruh siswa, mahasiswa, orangtua dan stake holder yang terlibat dalam proses keuangan Sekolah (Winarso, Asrianto, Rodiah, & Edo Arribe, 2021).
7. Penelitian yang dilakukan Sasnabila, Rahmat dan Sabrang pada Tahun 2022 dengan judul “Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Non-Tunai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram”. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa mahasiswa lebih memilih menggunakan APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) dibandingkan *e-money*, praktis menjadi alasan yang paling banyak dipilih mahasiswa sebagai alasan dalam penggunaan alat pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai masih yang menjadi pilihan mahasiswa dalam bertransaksi dan kendala yang sering dihadapi mahasiswa dalam penggunaan alat pembayaran non tunai adalah sering terjadi mesin error.

8. Penelitian yang dilakukan Mahayu dan Devi pada tahun 2022 dengan judul "Peningkatan Pelayanan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Secara Tunai dan Non-tunai di SD Harapan Nusantara Denpasar". Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pembayaran merupakan komponen (Rukun) penting dalam transaksi perdagangan barang atau jasa, perkembangan teknologi dan besarnya nilai transaksi serta resiko, sistem pembayaran yang aman dan lancar menjadi semakin penting dan mendukung perkembangan sistem keuangan. Sebuah alternatif yang menjadi pilihan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) pada transaksi keuangan santri di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami adalah pembayaran non tunai atau Cashless Payment. Sistem ini bertujuan untuk kemudahan transaksi, upaya preventif pengurus pesantren dalam meminimalisir terjadinya kekhawatiran dalam pengelolaan uang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektifitas BUMP Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami dalam pelaksanaan pembayaran Non Tunai (Cashless), metode yang digunakan adalah Pendekatan fenomenologi yang dilakukan secara sistematis dengan cara menggali informasi dari suatu fenomena dan pengalaman secara kritis. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa 1) beberapa wali santri belum memahami sistem Cashless. 2) Penerapan sistem cashless yang terbilang baru berjalan mengakibatkan minimnya penguasaan petugas kantin atau mart (Unit usaha) 3) Padatnya aktifitas santri dan kendala server pada sistem dan jaringan menghambat proses transaksi.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Oktavenus pada Tahun 2019 dengan Judul "Analisis Pengaruh Transformasi Digital dan Pola Perilaku Manajemen terhadap Perubahan Bisnis Model Perusahaan di Indonesia". Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh nilai  $R^2$  dari variabel Perubahan Bisnis Model adalah sebesar 0,561. Besaran nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya Perubahan Bisnis Model dapat dijelaskan oleh Digital Transformasi dan Pola Perilaku Konsumen sebesar 56,1%, sedangkan 43,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian tersebut. Dan hasil uji signifikansi hipotesis terhadap perubahan bisnis model

perusahaan: a) H1 : Terdapat pengaruh signifikan Transformasi Digital terhadap Perubahan Bisnis Model. Transformasi Digital mempengaruhi Perubahan Bisnis Model dengan t statistik 4,420 dimana  $> t$  tabel 1,98. b) H2 : Terdapat pengaruh signifikan Pola Perilaku Konsumen terhadap Perubahan Bisnis Model. Pola Perilaku Konsumen mempengaruhi Perubahan Bisnis Model dengan t statistik 7,765 dimana  $> t$  tabel 1,98 (Oktavenus, 2019).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Asep Zakariya Ansori pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pembayaran Non Tunai (Cashless) Pada Bump Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami”. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa kemajuan sistem pembayaran non tunai sangat signifikan dirasakan banyak pihak, sebagian besar santri Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami sudah merasakan manfaat penggunaan pembayaran non tunai atau Cashless payment, Meski layanan Cashless ini dianggap telah memberikan solusi, tapi masih terdapat kendala yang menyebabkan efektifitas layanan tersebut belum dirasa menyeluruh dan maksimal, dari hasil penelitian penulis didapatkan beberapa faktor yang menjadi kendala yang menyebabkan efektifitas Cashless Payment ini masih belum maksimal, diantara kendala yang didapatkan: 1. Tidak semua wali santri memahami dunia perbankan sehingga masih ada santri yang menerima uang tunai dari orang tuanya; 2. Penerapan sistem cashless yang terbilang baru berjalan mengakibatkan minimnya penguasaan petugas kantin atau mart (Unit usaha) terhadap sistem baru tersebut; 3. Padatnya aktifitas santri dan kendala server pada sistem dan jaringan terkadang menghambat proses transaksi; 4. Terdapat beberapa barang titipan yang tidak habis terjual karena efek dari poin di atas. Kendala di atas masih terbilang umum, mengingat sistem cashless payment ini terbilang baru dan sebagai saran dari penulis agar pengelola sistem dan unit usaha memberikan edukasi dan informasi yang menyeluruh kepada user baik santri, orang tua dan petugas yang melakukan transaksi dan harus ada evaluasi secara berkala agar efektifitas dari sistem ini bisa lebih signifikan.

Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan pada Variabel dan beberapa indikator yang diteliti. Yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti lebih kepada *user* atau pengguna layanan dan di penelitian terdahulu masih jarang dan sulit ditemukan yang meneliti bagaimana tata kelola manajerial dan administrasi. Selain itu dari banyaknya penelitian terdahulu ini masih di dominasi oleh metode penelitian kualitatif deskriptif dan studi literatur, sedangkan penelitian ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode kuantitatif umumnya adalah sebuah perwujudan dari paradigma berfikir deduktif (umum ke khusus) dimana peneliti mencoba mencari pengetahuan baru atau menguji keabsahan pengetahuan yang telah ada terhadap fenomena empiris yang peneliti amati peneliti dapat memahami kuantitas sebuah fenomena yang dapat digunakan nantinya untuk perbandingan

